

yang nantinya akan diserahkan kepada BPK RI, sudah melakukan sosialisasi terkait contoh dan penggunaan bantuan keuangan yang diterima partai politik. Proses dan alur dalam pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Proses tersebut dimulai dari tahap pemberian surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada partai politik, selanjutnya memberikan materi terkait dengan bantuan keuangan yang diberikan dan penggunaan yang telah ditetapkan kepada pengurus partai politik, dan yang terakhir adalah memberikan bahan mengenai proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. **Adaptasi:** Kesbangpol sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam memverifikasi atau menilai hasil laporan pertanggungjawaban yang diberikan partai politik. Kerjasama dilakukan bersama Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Kesbangpol Kepri akan membentuk tim yang berfungsi untuk melakukan verifikasi proposal dari partai politik dan melakukan pencairan pendanaan untuk partai politik, nama tim tersebut adalah Tim Verifikasi.

5.2 Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang dapat diharapkan mampu menjadi opsi dari pengambilan keputusan dari institusi atau lembaga terkait yang berada di dalam penelitian ini. Adapun implikasi kebijakan yang diberikan adalah:

1. Efektivitas Program Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik guna menjalankan salah satu aspek politik yang berada di Kepulauan Riau yaitu “Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik”, diharapkan memberikan penilaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi tolak ukur utama dalam penilaian keberhasilan penyerapan anggaran untuk pelaksanaan Pendidikan Politik di Partai Politik Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dengan banyaknya dan meningkatnya pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik, dapat menjadi keberhasilan Partai Politik dalam memberikan keilmuan dan kader mampu bermanfaat lebih luas untuk masyarakat.

5.3 Saran

Penelitian ini juga masih mengalami kekurangan, sehingga memerlukan saran baik dari segi pelaksanaan program di lapangan dan kepada institusi terkait, berikut saran yang bisa peneliti berikan, yakni:

1. Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang melakukan verifikasi dan pengumpulan data terhadap Laporan Kegiatan Partai Politik, diharapkan untuk memberikan rekomendasi kepada IDI Pusat untuk membahas secara detail mengenai, isi rancangan kriteria penilaian Pendidikan Politik atau

dalam bentuk buku saku, agar dapat diberikan kepada seluruh provinsi termasuk, Provinsi Kepulauan Riau. Dan, diserahkan kepada Partai Politik yang ada.

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau diharapkan untuk memberikan sosialisasi pada saat Partai Politik akan membuat sebuah Laporan kegiatan, sehingga Kesbangpol dapat meminimalisir *miss communication* pengumpulan data oleh Tim Pokja IDI Provinsi dan hasil penilaian yang dilakukan oleh IDI Pusat sesuai dengan kriteria yang mana hasil penilaian IDI setiap tahunnya dikeluarkan oleh BPS Pusat melalui BPS Provinsi Kepulauan Riau.
3. Partai Politik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada kader, hendaknya mengacu kepada kriteria yang telah ditentukan oleh Tim IDI Pusat, sehingga menjadi nilai pada indikator ke 22 IDI yakni “Pendidikan Politik kepada Kader Partai Politik”.